

DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DESA TERUNYAN, BALI

***Dewa Putu Oka Prasiasa; **Dewa Ayu Diyah Sri Widari**

*Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani Denpasar, Bali

dewaputuoka18@gmail.com

**Akademi Pariwisata Denpasar, Bali

dewaayusriwidari@gmail.com

Abstract

This Article aims to formulate empowerment strategies, identify forms of partnership, and develop an institutional reinforcement model to support Terunyan Tourism Village. The result shows that the strategy applied by the manager of Terunyan Tourism Village using Conformity Model that implements the program using the learning process approach. Partnerships conducted four patterns of interaction between the community institution of Terunyan Village, Terunyan Tourism Village, Tourism Stakeholders, and the Management of Terunyan Tourism Village. Institutional Reinforcement Model conducted among the involvement of all Village society and community institution in relation to support the Terunyan Tourism Village, and revitalize groups (*sekaha*) to strengthen the development of tourism products in Terunyan Tourism Village.

Keywords: Empowerment, Partnerships, Institutional Strengthening, Tourism Village, Terunyan

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan, mengidentifikasi bentuk-bentuk kemitraan, dan menyusun model penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata Terunyan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola Desa Wisata Terunyan mempergunakan model kesesuaian yang mengimplementasikan program dengan mempergunakan pendekatan proses pembelajaran. Kemitraan yang dilakukan berbentuk empat pola interaksi antara Pranata Masyarakat Desa Terunyan, Desa Wisata Terunyan, Pelaku Pariwisata, dan Pengelola Desa Wisata Terunyan. Model Penguatan Kelembagaan yang dilakukan antara lain melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa serta Pranata Masyarakat yang ada di desa dalam kaitan mendukung Desa Wisata Terunyan, dan merevitalisasi kelompok (*sekaha*) untuk memperkuat pengembangan produk wisata di Desa Wisata Terunyan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan, Desa Wisata, Terunyan*

Pendahuluan

Wisata hijau adalah suatu bentuk wisata yang terjadi sebagai akibat adanya pergeseran minat wisatawan dalam melakukan wisata. Pergeseran minat dalam berwisata itu ditandai dengan perubahan pola perjalanan wisata. Menurut Boniface (1999: 7) wisata hijau bercirikan skala kecil, menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan serta sosial, sejarah dan budaya, kehidupan liar, berada dalam kendali lokal, dukungan terhadap ekonomi lokal, penggunaan orang-orang lokal, berorientasi mutu, serta konservasi.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh perubahan pola perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan yang berwisata ke Bali antara lain dapat mengganggu terwujudnya harmonisasi kepariwisataan dan kebudayaan Bali. Karena pada awalnya pola perjalanan pariwisata budaya Bali dilandasi oleh falsafah *tri hita karana*, dan akibat perubahan yang terjadi saat ini falsafah tersebut mulai ditinggalkan. Akibatnya hubungan antara kebudayaan dan pariwisata tidak lagi sinergis, harmonis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya tidak dapat mensejahterakan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Jika kondisi ini terjadi, akan bertentangan dengan harapan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 pada intinya mengharapkan hubungan antara kebudayaan dan kepariwisataan dapat sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat, tercipta pelestarian budaya serta lingkungan.

Pengembangan potensi wisata diharapkan dapat memberi manfaat pada destinasi pariwisata dan masyarakat lokal. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberi solusi terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap budaya dan pariwisata dari perubahan pola perjalanan wisata adalah melalui pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan, kemitraan dan penguatan kelembagaan. Pengembangan desa wisata memiliki tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum tersebut adalah hadirnya bentuk pembangunan pariwisata yang bersinergi dengan budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan,

menyesuaikan dengan situasi kekinian, pemerataan serta memperluas pembangunan potensi lokal. Kemudian pemanfaatan potensi lokal dalam pembangunan pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Fakultas Teknik UGM, 1992: 3).

Meskipun Bali sebagian besar wilayahnya sudah diterpa oleh arus modernisasi, namun masih terdapat desa yang belum terjamah arus modernisasi. Desa tersebut memegang teguh adat istiadat dan tradisi tradisional yaitu Desa Terunyan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan merupakan desa tua di Bali serta dikenal sebagai *bali mula* atau *bali aga*. Untuk mencapai desa ini, pengunjung harus naik perahu dengan jarak yang cukup jauh. Saat ini jalan menuju Desa Terunyan sudah tersedia, namun kondisi jalan masih sangat memprihatinkan. Salah satu tradisi unik yang masih dipertahankan di daerah ini adalah tradisi pemakaman. Tradisi ini di luar *bali aga* dikenal istilah *ngaben*, namun di *bali aga* (Desa Terunyan) jenazah warganya diletakkan di tanah di bawah pohon. Pohon tersebut dikenal dengan nama *taru menyen*. Penguburan seperti ini disebut *mepasah* sebagai simbol jenazah sudah dikembalikan ke bumi.

Saat ini Desa Terunyan memiliki tiga kuburan. Pertama disebut *sema bantas*, kuburan yang diperuntukkan bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri, berkelahi dan penyakit ganas. Kedua disebut *sema nguda*, kuburan yang diperuntukkan bagi bayi atau orang dewasa yang belum menikah. Ketiga adalah *sema wayah*, kuburan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal akibat sakit biasa. Selain ketiga kuburan tersebut, Desa Terunyan juga memiliki potensi budaya berupa Pura Pancering Jagat yang berarti "Pusar Dunia", bangunan dengan satu atap besar di tengahnya yang disebut *bale agung*, dan tempat berkumpul para wanita lajang yang disebut *bale daha*.

Meskipun Desa Terunyan memiliki potensi alam, tradisi dan budaya yang sudah dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara, namun terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Desa Terunyan antara lain belum memiliki *something to do* (sesuatu yang dikerjakan) dan *something to buy*

(berbagai produk cinderamata untuk kenangan). Untuk pengembangan desa ini sebagai desa wisata, syarat adanya sesuatu yang dapat dilakukan di suatu kawasan sangat penting. Selain itu wisatawan harus memperoleh kenangan, sehingga perlu tersedia cinderamata sebagai ciri khas mereka sudah mengunjungi desa wisata.

Untuk dapat memunculkan *something to do* dan *something to buy*, strategi pemberdayaan, kemitraan serta penguatan kelembagaan dari Desa Wisata Terunyan perlu dilakukan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan merumuskan strategi pemberdayaan; menemukan bentuk kemitraan; serta menyusun/memformulasikan model penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Terunyan sebagai desa wisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretivisme (*post-positivisme*). Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, maka dalam hal ini peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan serta interpretasi data, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Oleh karena itu data dalam penelitian ini bersumber dari informan sebagai data primer dan dokumen serta monografi Desa Terunyan sebagai data sekunder. Penentuan Informan penelitian dilakukan menggunakan model *purposive*, terdiri dari Aparat Desa Terunyan, Pengurus Desa Adat Terunyan, Tokoh Masyarakat, Pengelola Desa Wisata Terunyan, dan Pemilik Usaha Pariwisata di Desa Terunyan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumen.

Pembahasan

Konsep Desa Wisata

Desa wisata dikenal juga dengan istilah *village tourism*, *rural tourism*, *farm tourism*, atau *agro tourism* (Leu, 1992:212; Dolors, 1995:49; Iakovidou, 1995:87; Oppermann, 1996:212; Dowling, 1996:220). Sedangkan desa wisata di Indonesia merupakan keterpaduan dari atraksi, akomodasi, serta fasilitas

pendukung yang tersaji dan menyatu dengan struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi (Nuryanti, 1993). Penetapan sebuah desa sebagai desa wisata harus memiliki daya tarik wisata (*attractions*), mudah dijangkau (*accessibilities*), dan terdapat sarana pariwisata (*amenities*). Keamanan dan dukungan masyarakat serta aparat desa sangat diperlukan. Desa wisata sebagai alternatif dalam pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk mengatasi sisi negatif yang terjadi pada pengembangan kawasan wisata yang bersifat tertutup (*enclave*).

Mengacu pada penelitian serta studi UNDP dan WTO, terdapat tiga pendekatan dalam pengembangan desa wisata yaitu interaksi tidak langsung, interaksi setengah langsung, dan interaksi langsung (UNDP dan WTO, 1981). Studi ini menekankan pada pentingnya cerminan suasana desa dalam pengembangan desa wisata. Untuk itulah atraksi di desa wisata ditujukan pada pengembangan budaya dan alam desa. Berdasarkan potensi desa, beragam atraksi dapat dikembangkan yaitu aktivitas persawahladangan, kesenian tradisional, permainan tradisional, arsitektur tradisional, serta budaya lokal. Jika ini terjadi, maka pengembangan desa wisata lebih memanfaatkan potensi desa. Fasilitas wisata yang disediakan harus menampilkan potensi desa. Desa dengan segala potensinya bukan saja dijadikan daya tarik wisata, akan tetapi keunikan serta keaslian yang berkaitan dengan cara hidup masyarakat desa perlu disajikan. Dengan demikian masyarakat dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan desa wisata.

Terkait perkembangan suatu desa wisata, Bashar dan Ajloni (2012) dalam kajiannya tentang motivasi wisatawan asing berwisata ke situs pedesaan di Petra, Yordania menyatakan bahwa salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke pedesaan karena tersedianya fasilitas lingkungan. Untuk itu revitalisasi program serta strategi diperlukan untuk memberikan pengalaman kepada wisatawan serta meningkatkan dampak sosial dan ekonomi. Selain aspek fasilitas, Chiu, et al. (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *image* afektif dipengaruhi oleh *image* kognitif dan mengkonfirmasi proses pembentukan *image* destinasi. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara

loyalitas wisatawan dengan *image* kognitif, namun ditemukan *image* kognitif tidak langsung mempengaruhi loyalitas wisatawan.

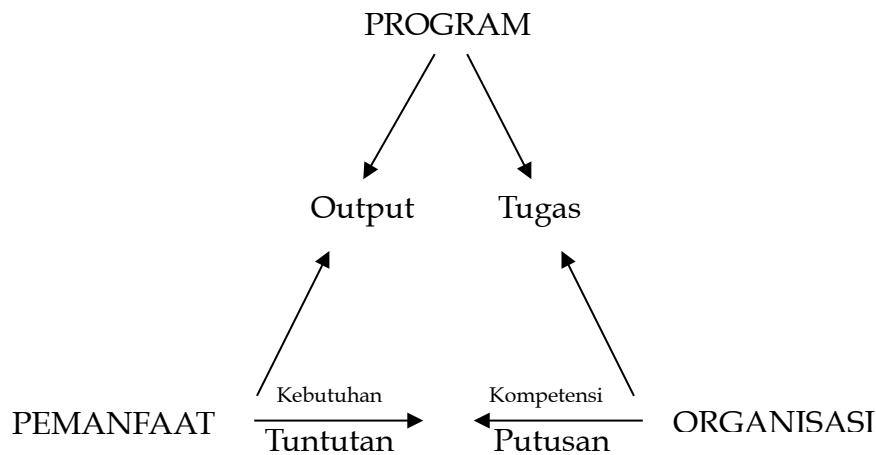
Senada dengan hal itu, dalam hal kualitas destinasi suatu desa wisata, Rajaratnam dan Nair (2015) mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat delapan atribut utama yang mempengaruhi kualitas destinasi yaitu fasilitas, aksesibilitas, logistik, pengalaman, kebersihan, informasi, keamanan, dan keramahan. Lebih lanjut, Chang dan Tsai (2016) dengan penelitiannya yang berjudul "*Influences of The Cultural Implications and Tourism Attractiveness of Festival Tourism on Tourist*", menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya tarik wisata adalah implikasi dan integrasi budaya yang membentuk pengalaman baru bagi wisatawan.

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata Terunyan

Menurut Tarigan (2000: 19) program yang diimplementasikan dengan mempergunakan pendekatan proses pembelajaran adalah salah satu bentuk Model Pemberdayaan. Model ini menekankan pada kesesuaian antara program, pelaksanaan, serta kelompok sasaran. Oleh karena itu, untuk merumuskan strategi pemberdayaan di Desa Wisata Terunyan, perlu dilakukan dengan mempergunakan Model Kesesuaian.

Lebih lanjut, menurut Tarigan (2000: 19) program akan berhasil dilaksanakan bila ada (1) terdapat kesesuaian antara penawaran program dengan kebutuhan kelompok sasaran (pemanfaat); (2) kesesuaian antara persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan (3) kesesuaian antara persyaratan program untuk menghasilkan *output* dengan yang dilakukan oleh kelompok sasaran program. Adapun Model Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1
Model Kesesuaian



Sumber: Tarigan, 2000:19

Berdasarkan model yang dikembangkan, dapat dipahami jika terjadi ketidaksesuaian antara tiga unsur dalam implementasi program, maka harapan yang ingin dicapai dari program sulit tercapai. Jika program *output*-nya tidak dibutuhkan oleh kelompok sasaran, maka *output* program tidak bermanfaat. Jika pelaksana program tidak mampu melaksanakan tugas sesuai persyaratan program, maka *output* program menjadi tidak tepat. Atau, jika kelompok sasaran tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana program, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Untuk itulah diperlukan kemampuan dari ketiga unsur tersebut menciptakan kesesuaian agar program dapat terimplementasi.

Dengan hadirnya Model Kesesuaian seperti Gambar 1 dapat memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Meskipun terjadi penyesuaian antar elemen - program, pemanfaat dan organisasi - namun ketiganya tetap merupakan dimensi dari isi kebijakan (program), dimensi dari konteks implementasi (organisasi), maupun dimensi dari *outcomes* (pemanfaat). Jika Model Kesesuaian dikembangkan sebagai sebuah strategi, dikaitkan dengan keberadaan Desa Terunyan yang dikembangkan sebagai desa wisata, secara matrik dapat disajikan seperti tabel berikut:

Tabel 1
Strategi Model Kesesuaian Desa Terunyan Sebagai Desa Wisata

Komponen Model Kesesuaian	Isi/Muatan	Prasyarat	Rekomendasi
Program (program yang dikembangkan oleh Desa Wisata Terunyan)	Penyajian produk wisata yang menjadi keunikan/ciri khas Desa Terunyan (<i>something to buy</i>)	Aksesibilitas dan Amenities berkualitas	Produk yang disajikan dapat berupa alam, budaya, tradisi, dan <i>man made</i> atau memadukan keempatnya
Pemanfaat (masyarakat desa setempat dan wisatawan)	Produk mengacu kebutuhan wisatawan Desa Wisata Terunyan	Produk harus unik, berkualitas, serta betul-betul berasal dari Desa Terunyan	Prinsip <i>quality tourism</i> dari <i>tourism village</i> harus tersaji secara baik dengan melibatkan masyarakat desa setempat
Organisasi (pengelola Desa Wisata Terunyan)	Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Terunyan	Melibatkan semua unsur / pranata kemasyarakatan yang memiliki kompetensi	Masyarakat yang dilibatkan pada pengelolaan dan operasionalisasi desa wisata betul-betul memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2019)

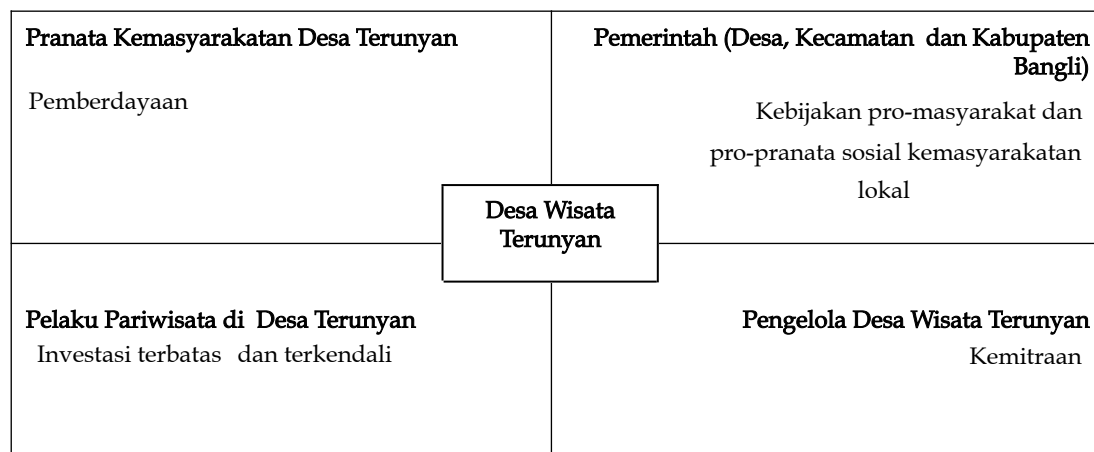
Selain penerapan strategi, keberhasilan pengembangan Desa Wisata Terunyan dilihat dari keberhasilan pemberdayaan (budaya, lingkungan, dan ekonomi tumbuh) dari masyarakat desa setempat; penerimaan kehadiran desa wisata oleh masyarakat Desa Terunyan; kemampuan mengembangkan dan membentuk jaringan desa wisata lain di Bali dan di luar Bali; semua pelayanan memenuhi standar bidang pariwisata; terbentuknya kelembagaan (*ancillary*) yang akan mengelola Desa Wisata Terunyan.

Bentuk-bentuk Kemitraan Desa Wisata Terunyan

Pengembangan Desa Wisata Terunyan tidak saja mengedepankan keuntungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, yang terpenting adalah keberlanjutan budaya dan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan Desa Wisata Terunyan, maka diperlukan kemitraan. Berikut ini disajikan bentuk-bentuk kemitraan antara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan seperti gambar berikut ini:

Gambar 2

Bentuk Kemitraan antara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan



Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2019

Berdasarkan bentuk kemitraan antara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan seperti Gambar 2, pola interaksinya dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Interaksi Pranata Kemasyarakatan Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan berwujud pemberdayaan pranata yang ada di masyarakat seperti pelibatan *banjar, tempek, dusun, sekaha-sekaha*. Dengan pemberdayaan pranata kemasyarakatan Desa Terunyan tersebut secara langsung dan tidak langsung masyarakat mendapat manfaat dari pengembangan desanya sebagai desa wisata.
2. Interaksi Pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) dengan Desa Wisata Terunyan, melalui kebijakan-kebijakan tidak saja terkait dengan

desa wisata, tetapi kebijakan-kebijakan sektor pariwisata yang lebih pro-rakyat dan pro-pranata kemasyarakatan desa sehingga betul-betul manfaat dari desa wisata dirasakan oleh masyarakat pada tingkat akar rumput.

3. Interaksi Pelaku Pariwisata di Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan. Implementasi interaksi ini jika dikaitkan dengan investasi, maka investasi harus bersifat 'terbatas dan terkendali', artinya investasi hanya dilakukan dengan mempergunakan modal (ekonomi, sosial dan budaya) yang menjadi milik masyarakat Desa Terunyan terhadap berbagai keperluan Desa Wisata Terunyan dengan diprioritaskan pada investasi yang bersifat memberdayakan masyarakat Desa Terunyan. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, investasi dari luar Desa Terunyan sangat dibatasi. Hal ini dimaksudkan agar efek menetes (*trickle down effect*) dari Desa Wisata Terunyan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
4. Interaksi antara Pengelola Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan. Interaksinya bersifat kemitraan dan pengelola hanya terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan wakil dari masing-masing pranata kemasyarakatan di Desa Terunyan. Komponen-komponen Desa Terunyan yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata berfungsi sebagai mitra kerja untuk saling menguatkan, sehingga Desa Wisata Terunyan memiliki nilai tambah dan daya saing. Daya saing desa wisata dapat dibentuk melalui transformasi data, informasi, dan ide. Hasil transformasi ketiganya dapat dirubah menjadi produk (*tangible* dan *intangibile*) yang dapat menciptakan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing desa wisata.

Isu-isu terkait komodifikasi (mutu produk, sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Manusia Pariwisata) menjadi hal yang penting dalam rangka keberlanjutan pengembangan desa wisata. Berdasarkan penelitian, isu komodifikasi di Desa Wisata Terunyan memerlukan program dan kebijakan

holistik sebagai akibat pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan yang memiliki kegiatan sangat kompleks, multi sektor, dan multi produk. Oleh sebab itu, diperlukan sinergisitas dari *Stakeholders* yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata Terunyan.

Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam manajemen pengelolaan desa wisata, maka diperlukan revitalisasi terhadap pranata kemasyarakatan yang ada di Desa Wisata Terunyan. Revitalisasi tersebut antara lain berupa peningkatan partisipasi masyarakat pada aktivitas di desa wisata, penataan areal di dan sekitar desa wisata, pemberian nilai tambah (*value added*) pada produk wisata beserta sistem pemasarannya dengan mempergunakan kekuatan jaringan di dan antara desa wisata yang ada di Bali.

Karena sektor pariwisata meliputi kegiatan yang kompleks dan multi sektor, maka isu berikutnya yang tidak kalah menariknya untuk dikemukakan adalah isu koordinasi (baik koordinasi internal maupun eksternal) dalam pengelolaan desa wisata. Peningkatan daya saing produk perlu melibatkan aktor utama yang ada di balik pengembangan desa wisata. Peran aktor utama tersebut merupakan isu strategis, karena dari aktor utama inilah kontribusi dalam pengembangan desa wisata akan berawal. Dalam pengembangan desa wisata, ada sejumlah aktor utama yang dapat diidentifikasi antara lain: Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), Asosiasi Profesi Pariwisata, Usaha Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Masyarakat, Media Massa, dan Lintas Departemen. Masing-masing aktor ini diharapkan akan memberikan kemudahan terutama terkait dengan penentuan peran serta fungsi masing-masing terkait dengan keterlibatannya dalam desa wisata. Masing-masing aktor bermitra guna memberikan kontribusi yang optimal bagi upaya mendorong keberhasilan sebuah desa wisata, termasuk bagi pengembangan Desa Wisata Terunyan.

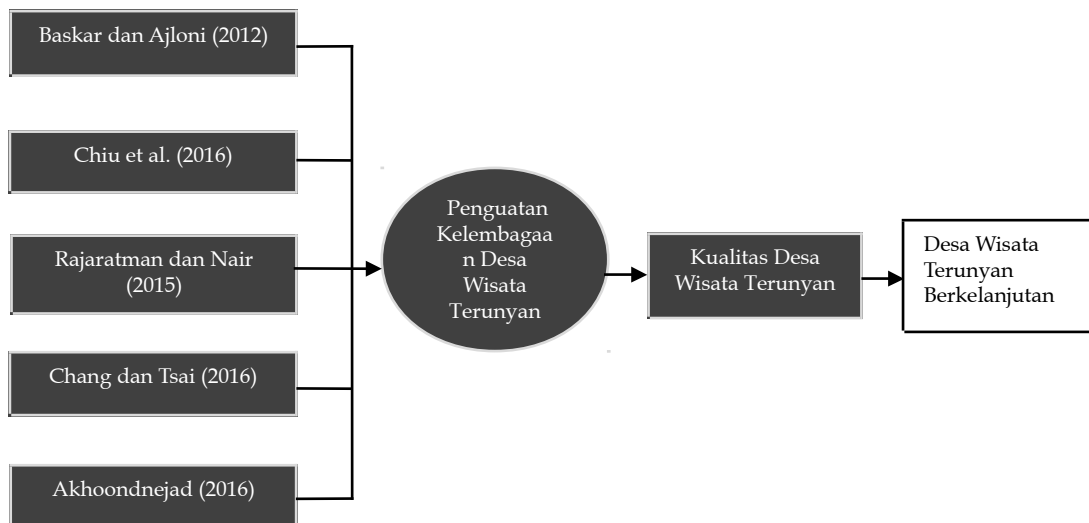
Penanganan yang komprehensif diperlukan terhadap berbagai isu (seperti pengelolaan, komodifikasi, koordinasi, dan aktor utama) sebagai sub sistem dalam kemitraan desa wisata. Melalui penanganan yang komprehensif tersebut

akan hadir desa wisata yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. Harapan tersebut akan tercapai apabila kualitas pengalaman wisatawan selama berwisata di desa wisata dapat ditingkatkan, dihasilkannya sumber daya manusia yang kompeten, dilakukannya survei terhadap produk yang dihasilkan oleh desa wisata, terhindarnya wisatawan dari dampak negatif oleh masyarakat lokal dan lingkungan (*resources stewardship*), terciptanya lingkungan usaha di desa wisata yang lebih baik melalui visi, misi, strategi, program serta kebijakan yang jelas serta dilaksanakan oleh *Stakeholders*.

Model Penguatan Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Terunyan sebagai desa wisata

Desa Wisata Terunyan memerlukan penguatan kelembagaan (*ancillary*), dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan serta autensitas Desa Terunyan sebagai desa *bali aga* di Bali. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan oleh masyarakat setempat dioperasionalkan dalam bentuk pengembangan Desa Wisata Terunyan. Penguatan kelembagaan di Desa Wisata Terunyan dilakukan melalui: (1) pelibatan seluruh lapisan masyarakat desa serta Pranata Kemasyarakatan dalam kaitan mendukung Desa Wisata Terunyan; (2) revitalisasi terhadap kelompok (*sekaha*) yang menghasilkan produk wisata untuk memperkuat pengembangan Desa Wisata Terunyan. Penguatan kelembagaan mampu memperkuat citra Desa Wisata Terunyan. Implementasi Sadar Wisata juga bertambah kuat sebagai akibat penguatan kelembagaan. Dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan, secara otomatis semua aktivitas terkait Desa Wisata Terunyan akan melembaga. Penguatan kelembagaan pada akhirnya dapat meningkatnya kualitas Desa Wisata Terunyan yang ditandai dengan tingkat kepuasan wisatawan yang semakin meningkat setelah mereka mengunjungi desa wisata tersebut. Jika penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Desa Wisata Terunyan dihubungkan dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat disajikan seperti gambar berikut ini:

Gambar 3
Hubungan Penelitian Sebelumnya dengan
Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Terunyan



Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2019

Penguatan kelembagaan yang telah dilakukan di Desa Wisata Terunyan mendukung implementasi penelitian Baskar dan Ajloni (2012) dari aspek fasilitas lingkungan pedesaan, revitalisasi program serta strategi pengembangan; Chiu et al. (2016) dari aspek *image* destinasi (termasuk di dalamnya *image* desa wisata sebagai bagian dari destinasi pariwisata); Rajaratman dan Nair (2015) dari aspek kualitas destinasi, persepsi terhadap destinasi, dan delapan atribut kualitas destinasi yaitu fasilitas, aksesibilitas, logistik, pengalaman, kebersihan, informasi, keamanan, dan keramahtamahan; Chang dan Tsai (2016) dari aspek integrasi dan karakteristik budaya yang dapat menciptakan pengalaman baru; serta Akhoondnejad (2016) dari aspek autentisitas yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap kualitas, nilai, dan kepuasan.

Struktur organisasi pengelola desa wisata sebagai cerminan dari kelembagaan desa wisata, saat ini diisi oleh pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam rangka penguatan kelembagaan Desa Wisata Terunyan, maka organisasi pengelola desa wisata kedepannya perlu diisi oleh perwakilan dari pranata kemasyarakatan yang ada di Desa Terunyan yaitu *bendesa adat*,

kelian banjar, kelian dusun atau *kelian tempek, sekaha-sekaha*, Badan Pertimbangan Desa, Pokdarwis, Generasi Muda (*teruna-teruni*), *Pecalang*, serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa setempat. Pelibatan pranata kemasyarakatan Desa Wisata Terunyan ditujukan untuk penguatan kelembagaan dan terimplementasinya pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sedangkan *Stakeholders* lainnya seperti dari Aparat Desa Terunyan, Pemerintah Kecamatan Kintamani, Pemerintah Kabupaten Bangli, dan Pemerintah Provinsi Bali bersifat sebagai pembina dan menjalankan fungsi koordinasi dengan desa wisata.

Penutup

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola Desa Wisata Terunyan adalah mempergunakan Model Kesesuaian yang berintikan kesesuaian antara tiga elemen yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.
2. Kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Terunyan berbentuk empat pola interaksi yaitu: (a) interaksi antara Pranata Kemasyarakatan Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan; (b) interaksi antara Pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) dengan Desa Wisata Terunyan; (c) interaksi antara Pelaku Pariwisata di Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan; dan (d) interaksi antara Pengelola Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan.
3. Model Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata adalah melalui (a) pelibatan seluruh lapisan masyarakat desa serta Pranata Kemasyarakatan yang ada di desa dalam kaitan mendukung pengembangan Desa Terunyan sebagai desa wisata berbasis budaya; dan (b) merevitalisasi kelompok (*sekaha*) yang

Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan Penguatan Kelembagaan di Desa Terunyan, Bali menghasilkan produk wisata untuk memperkuat pengembangan Desa Wisata Terunyan.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Mengacu pada strategi pemberdayaan yang dirumuskan dengan mempergunakan Model Kesesuaian, maka program-program yang disusun terkait operasionalisasi Desa Wisata Terunyan agar mengacu pada potensi alam, budaya, dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa Terunyan.
2. Kemitraan yang terjadi diantara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan diharapkan mampu menghasilkan program yang dapat mensejahterakan masyarakat Desa Terunyan.
3. Untuk memperkuat kelembagaan, pengelolaan Desa Wisata Terunyan agar melibatkan seluruh Pranata Kemasyarakatan Desa Terunyan yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Daftar Pustaka

- Akhoondnejad, A. 2016. "Tourist Loyalty to a Local Culture Event: the Case of Turkmen Handicrafts Festival." *Journal of Tourism Management* 52: 468-477. (<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.027>).
- Bashar, Ajloni, A.A.A. 2012. "Motivating Foreign Tourist to Visit The Rural Site in Jordan, Village of Petra." *Australian Journal of Business and Management Research* 2(5): 01-07.
- Boniface, Priscilla. 1999. *Mengelola Wisata Budaya Bermutu*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Chiu, W, Zeng, S., Cheng, P.S.T. 2016. "The Influence of Destination Image and Tourist Satisfaction on Tourist Loyalty: A Case Study of Chinese Tourist in Korea." *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research* 10(2): 223-234. DOI: 10.1108/IJCTHR-07-2015-0080.
- Chang, F.H., Tsai, C.Y. 2016. "Influences of The Cultural Implications and Tourism Attractiveness of Festival Tourism on Tourist Loyalty." *Journal of Business and Management Studies* 2(1): 1-10.
- Dolors, M.G., Canoves., Valdovinos. 1995. "Farm Tourism, Gender and The Environment in Spain." *Annals of Tourism Research* 22(2): 267-282. ([https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00096-4](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00096-4)).
- Dowling, R. 1996. "Ecotourism in Thailand." *Annals of Tourism Research* 23(2): 488-490.
- Fakultas Teknik. 1992. *Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknik Desa Wisata Terpadu di Bali*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Iakovidou, O. 1995. "The Female Gender in Greek Agrotourism." *Annals of Tourism Research* 22(2): 481-484. ([https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00099-9](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00099-9)).
- Leu, W. 1992. The Swiss Experience. In: Nuryanti (editor). *Universal Tourism Enriching or Degrading Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuryanti, Windu. 1993. "Concept, Perspective and Challenges." *Naskah Lengkap Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oppermann, M. 1996. "Rural Tourism in Southern Germany." *Annals of Tourism Research* 23(1): 86-102. ([https://doi.org/10.1016/0160-7383\(95\)00021-6](https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00021-6)).
- Rajaratnam, S.D., Nair, V. 2015. "Destination Quality an Tourist' Behavioural Intentions: Rural Tourist Destinations in Malaysia." *Journal Emerald*

Worldwide Hospitality and Tourism Themes 7(5): 463-472. DOI: 10.1108/whatt-06-2015-0026.

Tarigan, A. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*. Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

UNDP and World Tourism Organization. 1981. *Tourism Development Plan for Nusa Tenggara, Indonesia*. Madrid.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali.